



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Amarta

ꦲꦩꦠꦂꦤ꧀ ꦠꦚꦺꦴꦏꦏꦽꦏꦤ꧀ ꦢꦶꦤꦱꦤ꧀ ꦧꦺꦩꦝꦂꦲꦂꦤꦫꦺꦩꦥꦸꦤ ꦥꦺꦃꦭꦶꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦏꦺ ꦧꦺꦁꦏꦺꦤꦠꦺꦤ꧀ꦤꦠꦚꦺꦴꦏꦏꦽꦏꦤ꧀ ꦥꦺꦁꦒꦺꦤꦠꦺꦤꦠꦚꦺꦴꦏꦏꦽꦏꦤ꧀ ꦧꦺꦣꦺꦁꦤ꧀ꦧꦺꦣꦺꦤꦠꦚꦺꦴꦏꦏꦽꦏꦤ꧀

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 24 Mei 2023

Nomor : 800/2173
Sifat : Segera
Lampiran : 1 file
Hal : Permohonan Sambutan dan Narasumber (FGD Pendidikan Politik Perempuan)

Kepada
Yth. 1. Lurah Rejowinangun
2. Ka Badan Kesbangpol
3. Siti Sumaryatiningsih, M.Si (STPMD APMD Yogyakarta)

di

Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik/Sosial dan ekonomi bersama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan FGD Pendidikan Politik Perempuan yang akan dilaksanakan pada

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 24 Mei 2023 |
| Jam | : 13.00 WIB |
| Tempat | : Kantor Kelurahan Rejowinangun |

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada bapak/ibu untuk menjadi narasumber dengan tema sebagaimana tersebut dalam TOR terlampir. Untuk kelengkapan administrasi mohon untuk mengirimkan No. NPWP, KTP, dan No. Rekening.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Dinas

AK EDY MUHAMMAD
NIP. 196309161992031006





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DIPLOMA TIGA
Status Terakreditasi B (SK BAN PT. No. 3986/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019)

Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 550775, 561971 Fax. (0274) 515989 e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 85-A/PMD DIII/V/2023

Ketua Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma Tiga STPMD "APMD"
Yogyakarta, memberikan tugas kepada :

Nama : Siti Sumaryatiningsih, S.Si, M.I.P
NIDN : 0510048002
Pekerjaan : Dosen STPMD"APMD" Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber (FGD Pendidikan Politik Perempuan) dalam rangka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik/Sosial dan Ekonomi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2023 di Kantor Kelurahan Rejowinangun.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

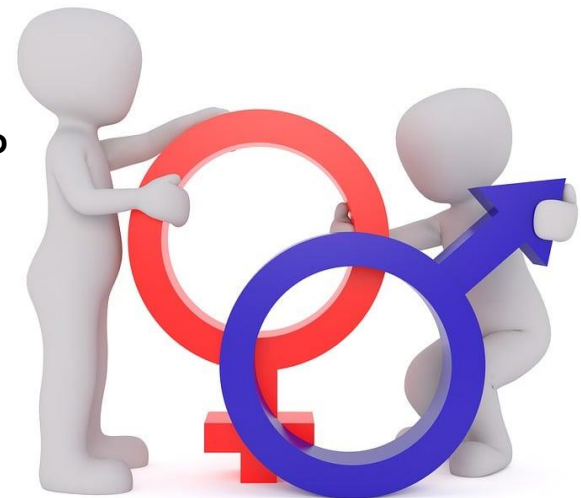
Yogyakarta, 30 Mei 2023
Ketua

Ir. Rini Dorojati, M.S



PEMAHAMAN GENDER UNTUK KEHIDUPAN BERKEADILAN

Siti Sumaryatiningsih, S.Si, M.I.P



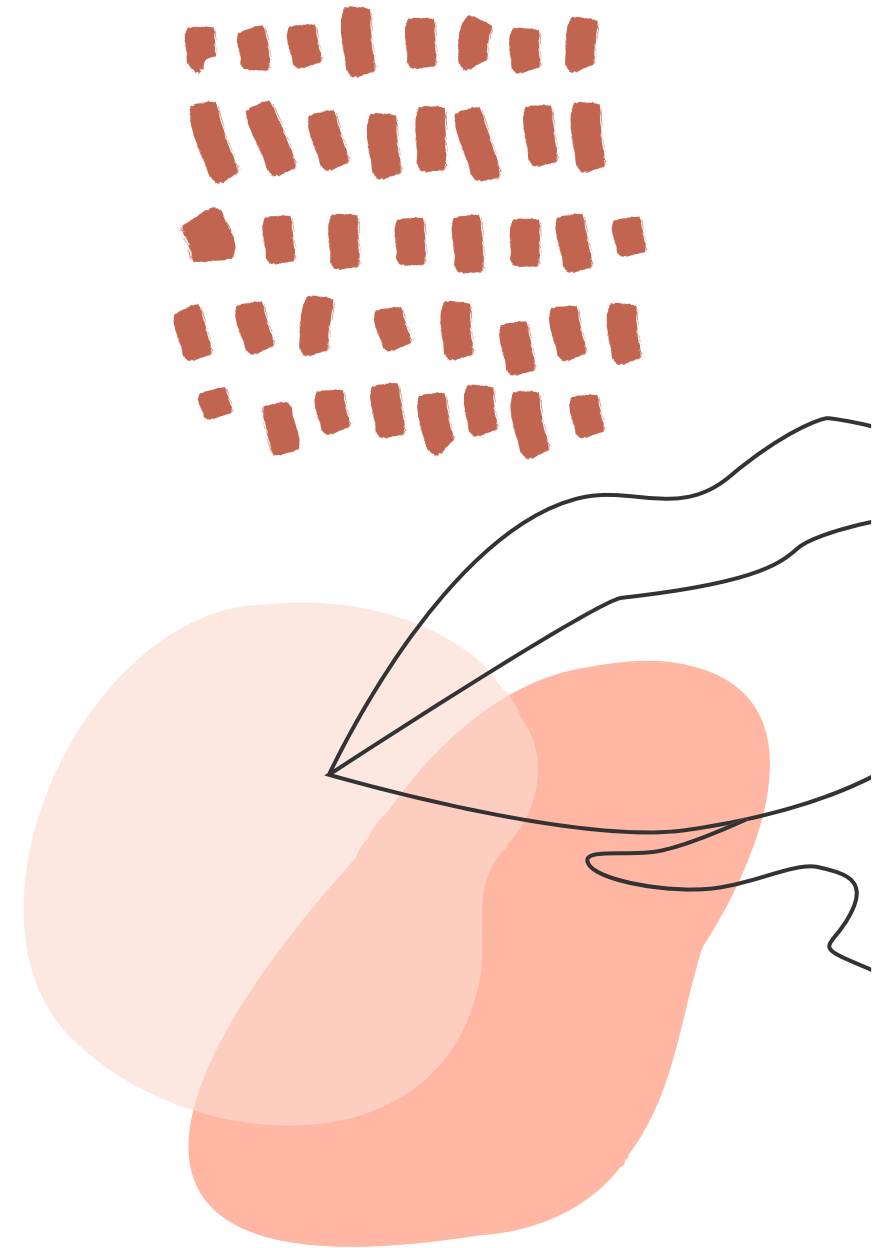
Materi

MEMAHAMI GENDER

- Apa itu gender?
- Apa perbedaan gender dan sex?

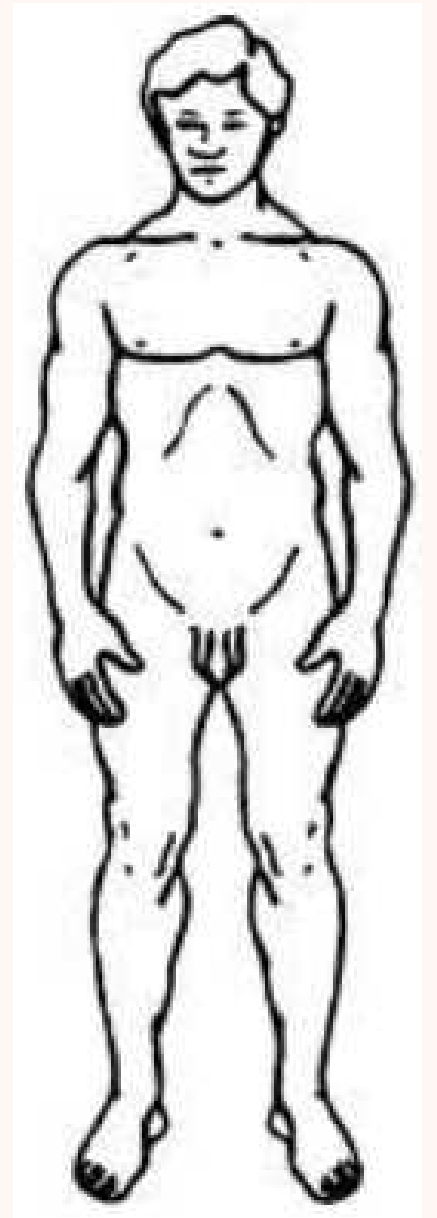
BENTUK KETIDAKADILAN GENDER

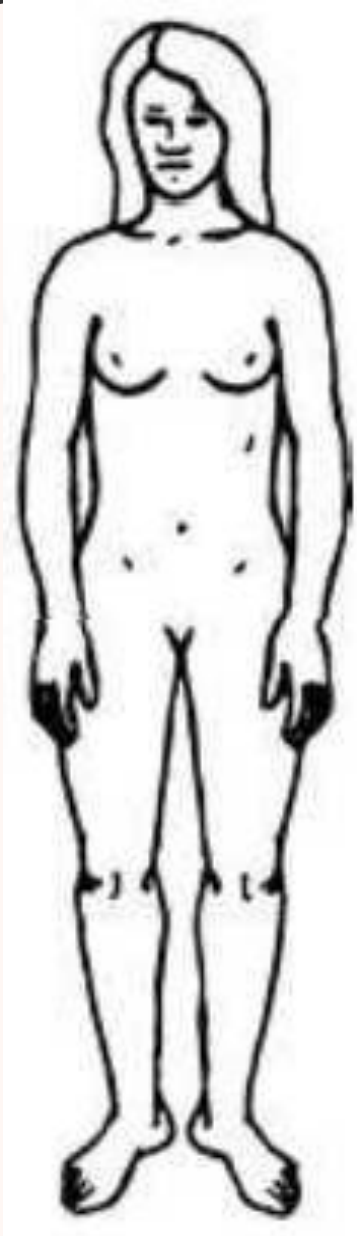
- Apa saja bentuk ketidakadilan gender?
- Bagaimana mewujudkan keadilan gender?



LAKI-LAKI

- **Memiliki Penis**
- **Memiliki testis (buah zakar)**
- **Menghasilkan spermatozoa**
- **Hormon testosteron**
- **Kelenjar prostate**
- **Buah dada tidak berkembang**
- **Janggut yang tumbuh**
- **Suara Membesar saat dewasa**





PEREMPUAN

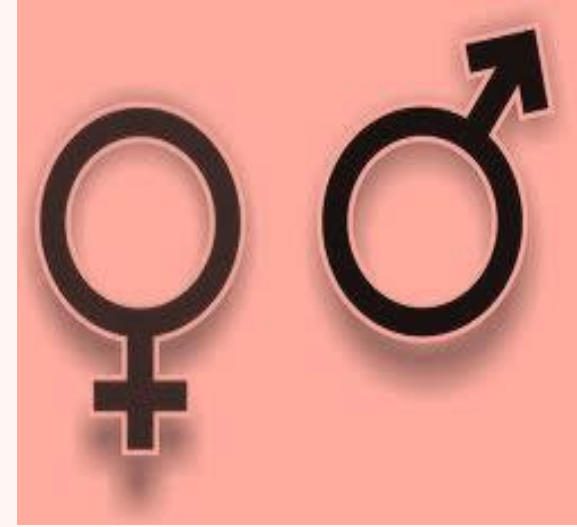
- Mempunyai rahim
- Mempunyai kapasitas untuk hamil dan melahirkan anak
- Mempunyai Vagina dan sel telur
- Mempunyai buah dada yang berkembang/tumbuh
- Mengalami menstruasi dan menopause

“Jenis Kelamin Sosial”

Kata gender berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus”, berarti tipe atau jenis.

Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki- laki berdasarkan jenis kelaminnya dalam hal sifat, peran, posisi, tanggungjawab, akses, fungsi, kontrol.

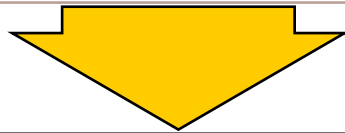
Kesemua ini dibentuk/dikonstruksi secara sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor: budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain- lain



Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

JENIS KELAMIN

Perbedaan organ biologis perempuan & laki-laki (bagian reproduksi)

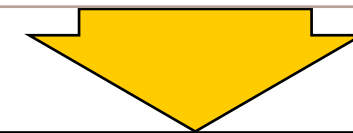


1. Ciptaan Tuhan
2. Alamiah
3. Universal & permanen
4. Tetap & tidak dapat berubah
5. Tidak dapat ditukar
6. Berlaku sepanjang masa



GENDER

Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan & laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial



1. Ciptaan manusia
2. Dibentuk secara sosial
3. Lokal
4. Berubah-ubah
5. Dapat ditukar
6. Bergantung masa & budaya

Perempuan: Menstruasi, Hamil, Melahirkan & Menyusui
Laki-laki: Membuahi (spermatozoa)

Perbedaan Sifat, Fungsi, Ruang dan Peran Gender berdasarkan Persepsi Masyarakat



| | | |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
| Sifat | Maskulin | Feminin |
| Fungsi | Produksi | Reproduksi |
| Ruang | Lingkup Sosial | Lingkup Rumah Tangga |
| Peran | Nafkah Utama | Nafkah Tambahan |

Gender

CARA/PERLAKUAN
terhadap anak
(perempuan & laki-laki)

**Menciptakan bentuk-
bentuk DISKRIMINASI**



Bagaimana MENJADI
perempuan & laki-laki
dalam aktivitas sosial

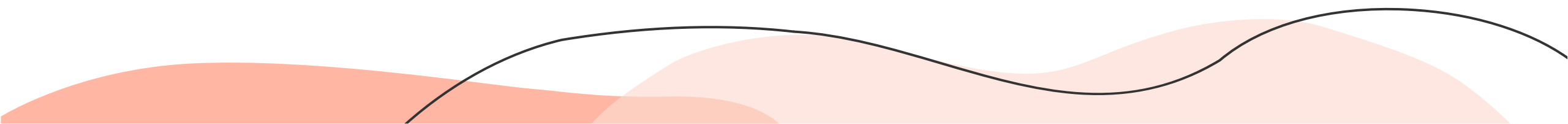
Menciptakan
KEBUTUHAN gender
(praktis & strategis)

Menciptakan PERAN
yang pantas bagi
perempuan & laki-laki


Menciptakan RELASI
berdasarkan peran gender

Konsepsi Gender

konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat

The bottom of the slide features decorative wavy lines in shades of orange and red, creating a modern, abstract background element.

Teori Nurture



Perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Laki-laki diidentikkan dengan *borjuis*, sedang perempuan adalah *proletar*.

aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktifitas masyarakat seperti di DPR, militer, manajer, menteri, gubernur, pilot, dan pimpinan partai politik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (*affirmatif action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut.

Teori Nature



Adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya.

Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya.

Gender menjadi masalah jika

terjadi **ketimpangan**

satu pihak **dirugikan**

satu jenis kelamin dibedakan **derajatnya**

satu jenis kelamin dianggap **tidak mampu**

satu jenis kelamin diperlakukan **lebih rendah**

satu jenis kelamin mengalami **ketidakadilan** gender

Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender

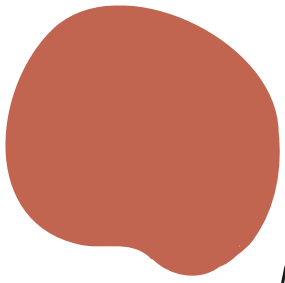
Marginalisasi atau peminggiran perempuan

Sub Ordinasi

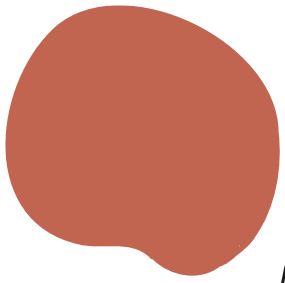
Stereotype

Kekerasan

Beban ganda

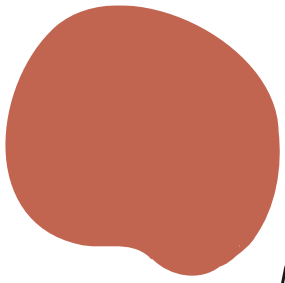


**Gender tidak masalah jika :
dilakukan secara adil
menguntungkan kedua belah
pihak**



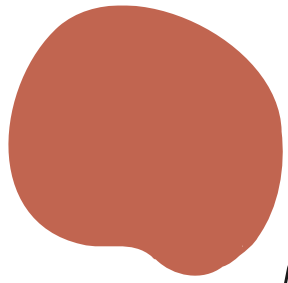
Kesetaraan Gender

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.



Keadilan Gender

suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki



**Berlaku adil di rumah, tempat
kerja, di lingkungan
masyarakat**

Dikatakan Adil jika

Terdapat pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam hal:

Akses (peluang),

- Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber dayapembangunan.

Partisipasi,

- Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Kontrol - keputusan atas diri sendiri,

- perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.

Manfaat,

- pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.



EMPAT STRATEGI MENINGKATKAN KESETARAN GENDER

Komitmen Politik:

- Revisi Undang-undang dan Peraturan yang bias gender

Kerangka Kebijakan:

- Reformasi Birokrasi guna menjamin keadilan gender: Kebijakan dan Anggaran responsif gender (KRG & ARG)

Sumber daya:

- Mendorong keseimbangan akses dan partisipasi meningkatkan sumber daya manusia, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Kultur:

- Melakukan Resosialisasi dan re-edukasi Norma budaya, pemahaman agama dan praktek-praktek sosial yang sensitif gender menuju kesetaraan keadilan gender

MASALAH KESENJANGAN GENDER

Meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini **DISKRIMINASI BERBASIS GENDER MASIH TERJADI** pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia.

Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. **BELUM ADA SATU WILAYAH PUN DI NEGARA DUNIA KETIGA** di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya & ekonomi, dan partisipasi politik masih terjadi diberbagai tempat: *Perempuan & anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang.*

KOMITMEN INTERNASIONAL KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER (KKG)

Pemerintah mengubah strategi pemberdayaan perempuan diubah dari Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan (WID) menjadi Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender/ PUG) dalam pembangunan.

Pengarusutamaan Gender harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah dengan memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender kedalam seluruh kebijakan pembangunan, mulai dari perenanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

DEFINISI PENGARUSUTAMAAN GENDER (INPRES No.9 TAHUN 2000)

*Strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan **pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan** perempuan dan laki-laki ke dalam **perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi** dari seluruh **kebijakan, program dan kegiatan** di bidang pembangunan*

*Proses yang memasukkan **analisis gender** ke dalam program dan kegiatan dari **instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan** mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.*

■ Indikator Makro Gender (Fakta Kesenjangan Gender)

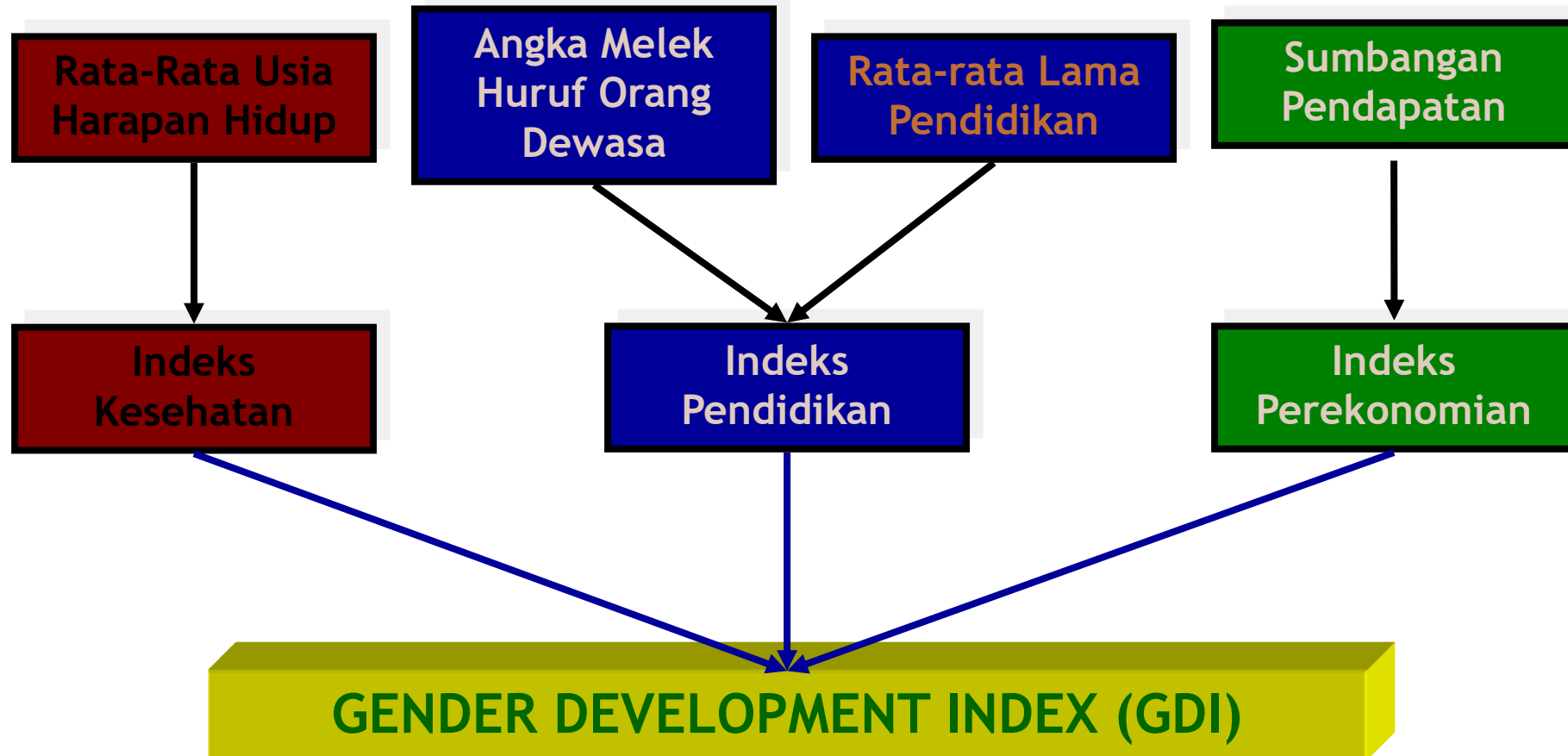
Gender Development Index (GDI):

- mengukur kesenjangan gender dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan dan Pendapatan (Hak SOSBUD)

Gender Empowerment Measures (GEM):

- mengukur kesenjangan gender dalam hal keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (Hak Politik & Ekonomi)

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (GDI)



INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (GEM)

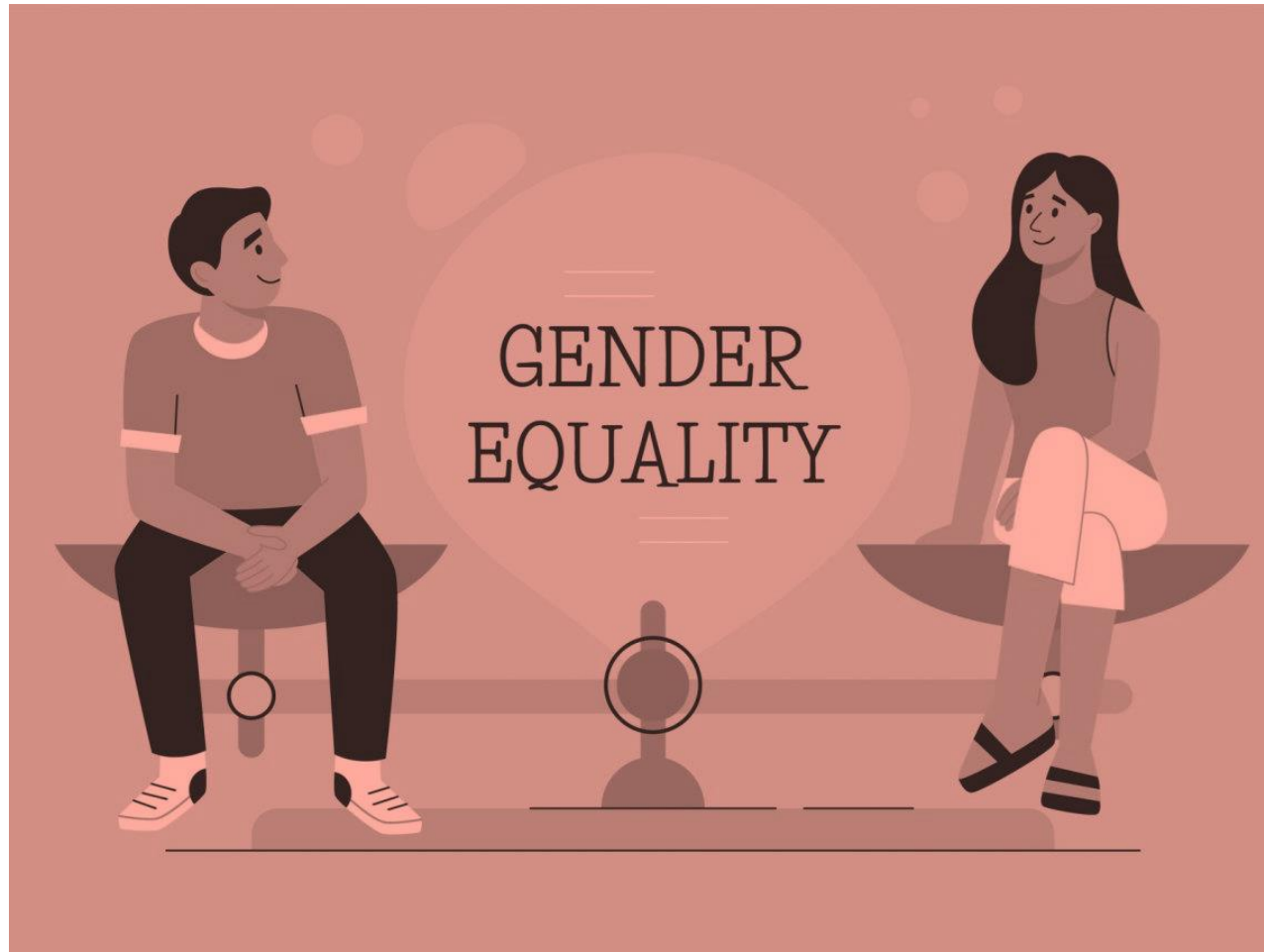
POLITIK:

Anggota Parlemen
Tenaga Eksekutif

EKONOMI:

- Tenaga Profesional Manajer
- Angkatan Kerja
- Rata-Rata Upah di Sektor non Pertanian

GENDER EMPOWERMENT MEASURES (GEM)



MATURNUWUN



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DIPLOMA TIGA
Status Terakreditasi B (SK BAN PT. No. 3986/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019)

Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 550775, 561971 Fax. (0274) 515989 e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 89-A/PMD DIII/VI/2023

Ketua Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma Tiga STPMD "APMD"
Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Sumaryatiningsih, S.Si, M.I.P
NIDN : 08510048002
Pekerjaan : Dosen STPMD"APMD" Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas sebagai Narasumber (FGD Pendidikan Politik Perempuan) dalam rangka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik/Sosial dan Ekonomi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2023 di Kantor Kelurahan Rejowinangun.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 30 Juni 2023
Ketua

Ir. Rini Dorojati, M.S



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

SERTIFIKAT

No : 896/020/DP3AP2KB/VII/2023

Diberikan kepada :

Siti Sumaryatiningsih, S.Si.,M.I.P

Sebagai :

Narasumber

Pada Kegiatan FGD Pendidikan Politik Perempuan
yang diselenggarakan pada Rabu, 24 Mei 2023
bertempat di Kantor Kelurahan Rejowinangun Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Kepala Dinas

Gfr. Eddy Muhammad

NIP 196309161992031006